



JURNAL

SOSIOLOGI INDONESIA

ISSN : 1410-0061

No. 1/Juli/1996

**Harsja Bachtiar : Masyarakat, Bangsa, Negara
dan Umat di Indonesia**

**Sajogyo : Pemerataan Pembangunan
dan Penanggulangan Kemiskinan**

**Soedjito Sosrodihardjo : Metodologi dan
Teori Sosiologi di Indonesia**

**MT Felix Sitorus : Epistemologi Sosiologi
Pedesaan Indonesia**

**Keppi Sukei : Dinamika Hubungan Gender
dalam Pengelolaan Tebu Rakyat**

DITERBITKAN OLEH
IKATAN SOSIOLOGI INDONESIA

JURNAL SOSIOLOGI INDONESIA (JSI) diterbitkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Sosiologi Indonesia (I.S.I.) dalam rangka mengembangkan sosiologi di Indonesia. **JSI** diharapkan menjadi forum pembahasan yang kritis mengenai karangan ilmiah sosiologi yang mencakup perkembangan teori dan metodologi, evaluasi kebijakan sosial dan hasil penelitian.

Karangan ilmiah yang diterbitkan tidak harus sesuai dengan pendapat dewan redaksi dan hak atas karangan ilmiah tetap berada pada penulis.

Redaksi mengundang sosiolog dan peminat sosiologi untuk menyumbang karangan ilmiah bagi pengembangan sosiologi.

DAFTAR ISI

- ii** Pengantar Redaksi
- iii** Sambutan Ketua Umum I.S.I. Pusat
- 1** *Masyarakat, Bangsa, Negara dan Umat di Indonesia (Teori Sosiologi dan Kenyataan Sosial)*
Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
- 15** *Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan*
Prof. Dr. Sajogyo
- 23** *Metodologi dan Teori Sosiologi di Indonesia*
Prof. Soedjito Sosrodihardjo SH, MA
- 36** *Perkembangan Sosiologi di Indonesia*
Dr. Kamanto Sunarto
- 48** *Epistemologi Sosiologi Pedesaan di Indonesia*
Ir. MT Felix Sitorus, M.S.
- 61** *Hubungan Kerja dalam Sistem Pengelolaan Tebu Rakyat, Dinamika Hubungan Gender dan Pengaruhnya terhadap Status Wanita*
Dr. Ir. Keppi Sukesi, M.S.
- 81** *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial: Suatu Studi Awal Masyarakat Jakarta*
Dr. Iwan Gardono Sujatmiko
- 96** *Mengenang (Sutan Gersjac) Harsja W(ardhana) Bachtiar (3 Mei 1934-18 Desember 1995)*
Dr. Kamanto Sunarto

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG:

Prof. Dr. Haryono Suyono

PENASEHAT:

Prof. Dr. Selo Soemardjan

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab: Prof.
Dr. Sediono MP
Tjondronegoro
Wakil Pemimpin
Redaksi/Penanggung
Jawab: Dr. Kamanto
Sunarto

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Sajogyo
Prof. Soedjito
Sosrodihardjo SH, MA
Dr. Mely G. Tan
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo
Prof. Soetandyo
Wignyosoebroto, MPA
Prof. Dr. Usman Pelly, MA
Prof. Dr. Kusnaka
Adimihardja
Prof. Dr. Idrus Abustam
Dr. Nasikun

Redaktur

Pelaksana

Ketua: Dr. Iwan Gardono
Suatmiko
Wakil: Drs. Purwanta
Iskandar, MSc
Sekretaris: Dra. Iriani,
MSi
Bendahara: Drs. Edy
Purwanto
Anggota:
Dr. Tamrin Amal
Tomagola
Dr. Rohadi Haryanto, MSc
Dra. Kooshardjanti
Tien Handayani, SH, MSi

ISSN: 1410 - 0061

PENGANTAR REDAKSI

Dengan rasa gembira dan penuh harapan Redaksi mulai mengedarkan nomor perdana Jurnal I.S.I. dalam bulan Juli 1996 ini. Perlu kami jelaskan bahwa karangan-karangan yang dimuat dalam nomor ini telah dipilih oleh Redaksi dari kumpulan karangan yang pernah disajikan dan didiskusikan waktu Kongres I.S.I. pertama di Bandung (Desember 1992) dan waktu Kongres I.S.I. kedua di Ujung Pandang (Desember 1995).

Harapan Redaksi, ialah bahwa penampilan dan isi nomor perdana ini akan merangsang banyak anggauta I.S.I. di daerah maupun di pusat untuk menyumbangkan karangan ulasan teori atau metodologi, hasil penelitian, timbangan buku, agar setiap nomor Jurnal dari 6 yang direncanakan untuk periode 1996-1998, dapat diisi dengan karya tulis yang bermutu.

Untuk nomor Jurnal I.S.I. berikutnya yang direncanakan terbit bulan Desember 1996 Redaksi ingin memilih Keluarga Sejahtera sebagai tema utama, dan kami mengajak rekan-rekan yang berminat mulai menulis agar naskah karangannya dapat diterima Redaksi sebelum tanggal 15 Oktober 1995.

Redaksi Pelaksana

STRATIFIKASI DAN MOBILITAS SOSIAL

(Suatu Studi Awal Masyarakat Jakarta)*

oleh

Iwan Gardono Sujatmiko

(Universitas Indonesia)

Permasalahan

Stratifikasi sosial baik dalam aspek statis maupun dinamisnya merupakan fokus penting dalam sosiologi. Dengan mempelajari stratifikasi, kita dapat mengamati proses dan perubahan sosial secara cermat. Studi stratifikasi bermanfaat untuk mengetahui sebaran kekuasaan dan kepentingan dalam masyarakat serta pembuatan kebijakan seperti perpajakan maupun dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Tjondronegoro 1988:71).

Karena pentingnya masalah stratifikasi sosial maka perlu diketahui persepsi masyarakat mengenai hal tersebut dan bagaimana keterbukaan suatu stratifikasi atau mobilitas sosial khususnya antar generasi. Demikian pula perlu diketahui pola mobilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Mobilitas sosial dalam sosiologi dapat dibedakan antara mobilitas horizontal dimana seseorang mengalami perpindahan pekerjaan tetapi berada dalam posisi yang tetap. Sementara itu mobilitas vertikal dapat terjadi baik dalam pekerjaan seseorang (menaik atau menurun) atau mobilitas okupasi intra-generasi dan perubahan status seorang anak dibandingkan dengan ayahnya atau mobilitas okupasi antar-generasi. Dalam studi stratifikasi masyarakat Jakarta ini mobilitas sosial diartikan sebagai mobilitas okupasi antar-generasi.

Teori-Teori Stratifikasi Sosial

Dalam studi stratifikasi sosial terdapat empat pendekatan: Fungsionalis, Weberian, Neo-Marxist dan kategori sosio-profesional (Levy dan Joye 1994 : 320).

Pendekatan fungsionalis melihat stratifikasi sebagai kumpulan dari status-status dan model analisisnya adalah Status Attainment Model dimana status dirangking menurut prestis dan pendapatan (lihat Blau dan Duncan 1967). Perspektif ini dikritik karena menunjukkan seolah-olah masyarakat terdiri dari status-status yang berurutan (rangking) tanpa menekankan pentingnya lapisan-lapisan dalam masyarakat.

Perspektif Neo-Marxist menekankan peran pemilikan alat produksi yang mendominasi stratifikasi. Teori-teori Marxist kontemporer seperti yang dibahas oleh Wright masih tetap berusaha mempertahankan peran pemilikan alat produksi walaupun ia melengkapinya dengan kelas-kelas baru kedalam model lima-kelas yang mencakup posisi kelas yang kontradiktif (contradictory class positions) seperti "small employers," "managers and supervisors," dan "semi-autonomous wage earners." (1985). Namun perspektif ini terlalu memaksakan kriteria tersebut sehingga menghasilkan kategori yang tidak jelas seperti menggabungkan pengacara dan petugas kebersihan dalam satu kelas (semi-autonomous employees) (lihat

* Versi awal dari makalah ini pernah disajikan dalam Seminar Nasional ISI di Ujungpandang, November 1995. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Paulus Wirutomo yang memberi ijin menitipkan kuesioner penelitian ini pada Penelitian Komunitas RW di DKI Jakarta oleh LabSosio-FISIP-UI, 1994. Demikian juga terima kasih untuk Dra. Ida Ruwaida yang membantu mengkordinir pengumpulan data dan Drs. Rizal H. Jayadi yang membantu pengolahan data. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro atas saran dan kritiknya. Kesalahan dalam hasil penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Saunders 1990: 33).

Dalam pendekatan Okupasi (ISCO: International Standard Classification of Occupations) masyarakat dibagi dan dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan dan biasanya digunakan oleh Biro Statistik. Mayoritas negara yang ada menggunakan okupasi dan menerapkan ISCO tersebut (Treiman 1977: 100). Kelemahan pendekatan ini adalah tiadanya kejelasan pembagian stratifikasi dan masyarakat seringkali hanya digolongkan pada dua kelompok besar yakni blue-collar dan white collar. Demikian pula pembagian ini tidak sensitif pada mereka yang bekerja di sektor agraris (Treiman 1977: 72).

Perspektif Weberian merupakan kritik terhadap perspektif Marxist yang menekankan satu dimensi atau pemilikan alat produksi. Model Weberian yang terkenal dikembangkan oleh Goldthorpe yang menganalisis dan membagi masyarakat Inggris berdasarkan pemilikan, kualifikasi dan prestis menjadi tujuh kelas (Goldthorpe 1980). Pendekatan ini dekat dengan pendekatan okupasi hanya saja okupasi yang ada dikelompokkan berdasarkan strata.

Dalam studi sosiologi, okupasi sering dianggap sebagai kriteria dasar dari studi stratifikasi. Berbagai pendapat menganggap bahwa okupasi merupakan indikator tunggal terbaik tentang stratifikasi (Gilbert dan Kahl 1982:47; de Guzman 1983:63; Svalastoga 135).

Teori Dan Model Mobilitas Sosial

Teori dan model mobilitas sosial atau mobilitas okupasi antar-generasi berkaitan dengan teori stratifikasi. Bagi model Status attainment mobilitas okupasi antar generasi sering dilihat dengan mengetahui korelasi antara okupasi antara ayah dan anak. Model ini menggunakan tehnik regresi dan analisis jalur (path analysis) sehingga diketahui sumbangan berbagai faktor dalam pencapaian status responden. Namun model ini sering dianggap kurang menunjukkan lapisan sosial dan batas-batasnya atau terlalu individualistik

karena melihat skor prestis status anak dan ayah dalam skala interval yang kontinum (lihat kritik tersebut dalam Pomer 1981: 50).

Dalam model Marxist yang dibandingkan adalah pekerjaan responden dengan ayahnya dilihat dari kelas masing-masing. Misalnya berapa persen anak buruh akan menjadi manajer atau borjuis kecil. Demikian pula model Okupasi yang banyak membandingkan okupasi responden dengan ayahnya berdasarkan golongan okupasi. Misalnya berapa persen responden yang berprofesi sebagai manajer mempunyai ayah yang bekerja sebagai operator. Dalam model Weberian akan dilihat bagaimana mobilitas anak dapat terjadi jika dilihat dari lapisan sosial ayahnya.

Selama ini terdapat beberapa teori yang menyatakan mengapa terjadi mobilitas okupasi antar generasi. Suatu teori menyatakan bahwa mobilitas terjadi karena: tumbuhnya kompleksitas masyarakat dan terdistribusinya bakat, inteligensia dan keterampilan pada masyarakat (Lipset dan Bendix 1959: 2-3). Terjadinya mobilitas dianggap karena sirkulasi dalam karir: ada yang naik dan turun; perubahan teknologi; berkurangnya penduduk (jumlah anak) pada strata atas dan perpindahan penduduk (Gilbert dan Kahl 1982:170). Terdapat pula teori yang menyatakan bahwa mobilitas terutama disebabkan oleh kebijakan atau intervensi pada sistem pendidikan (Parkin 1971:111).

Secara teoretik, konsep mobilitas vertikal antar generasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur Keadilan sosial. Keadilan Sosial memang mempunyai dimensi horizontal (regional, jender, agama, dan suku) dan dimensi vertikal (okupasi). Selama ini Keadilan Sosial seringkali ditafsirkan sebagai Kesejahteraan Sosial (Welfare) atau Kadilan Hukum (legal justice). Demikian pula Keadilan Sosial diartikan sebagai "Keadilan distribusi" sebagai padanan Keadilan Ekonomi atau "keadilan dalam penguasaan sistem produksi" (lihat Mubyarto 1988: 36).

Tinjauan Studi Stratifikasi Dan Mobilitas Di Indonesia

Studi mengenai stratifikasi sosial di Indonesia sampai tahun 1960an telah disumbang oleh Karl Jaspian yang telah membuat *annotated bibliography* dari 173 buku (Jaspian 1961). Demikian pula pembahasan stratifikasi sosial, khususnya masyarakat pedesaan, telah disumbang oleh Antropologi sosial dan Studi Pedesaan dan Pertanian (Tjondronegoro 1988). Selain itu studi tentang stratifikasi dan prestis okupasi dengan metode reputasional telah dilakukan oleh Thomas (1975) di tiga desa di Jawa Barat. Hanya saja studi Thomas tidak diperdalam dengan menganalisis mobilitas sosial.

Perkembangan studi mobilitas sosial (yang seringkali berarti mobilitas vertikal okupasi antar generasi) di Indonesia ter tinggal jauh oleh studi mobilitas penduduk (demografis) yang membahas mobilitas secara horizontal (geografis) (lihat Alatas 1995). Sebenarnya stratifikasi dan mobilitas sosial (terutama mobilitas okupasi antar-generasi) merupakan fokus sosiologi yang penting dan tidak dianalisis oleh bidang studi lain.

Studi yang mengukur skala prestis dan mobilitas vertikal antar generasi di perkotaan telah dilakukan Yasmin Moningga di Jakarta (Moningga 1992). Sedangkan Yohanes Bahari melakukannya studinya di pabrik di Pontianak (1994). Kedua studi tersebut menggunakan model Status attainment dengan tehnik regresi dimana dibuat ranking okupasi yang digunakan untuk melihat perubahan okupasi antar generasi.

Sementara itu perspektif Okupasi dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik yang membagi masyarakat berdasarkan "jenis pekerjaan" menjadi Profesional & Teknisi, Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, Tenaga Tata usaha, Tenaga Penjualan, Tenaga Jasa, Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan serta Tenaga Produksi, operator alat angkutan. Sampai saat ini studi mobilitas okupasi dengan menggunakan kategori seperti diatas belum dilakukan.

Studi empirik stratifikasi sosial masyarakat Jakarta yang menggunakan perspektif Neo-Marxist dengan model Wright belum dilakukan di Indonesia. Namun dapat diduga bahwa model ini yang terfokus pada pemilikan alat produksi jika diterapkan untuk menganalisis masyarakat kota yang kompleks akan mengalami kesulitan. Model ini dapat saja berguna jika digunakan dalam analisis dengan skala yang lebih kecil seperti stratifikasi sosial di pabrik, perkebunan atau pertanian.

Penelitian awal penulis tentang masyarakat Jakarta ini menggunakan model Weberian seperti yang dilakukan oleh Goldthorpe. Hanya saja lapisan yang digunakan adalah enam: atas-atas; atas-bawah; menengah-atas; menengah-bawah; bawah-atas dan bawah-bawah. Pada setiap lapisan terdapat jenis pekerjaan secara multi-dimensi pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Dengan model ini kita dapat jelas mengetahui lapisan masyarakat Jakarta sekaligus jenis pekerjaannya.

Tujuan Penelitian

Studi awal mengenai stratifikasi masyarakat Jakarta ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat tentang stratifikasi.
2. Mengetahui pola mobilitas okupasi antar generasi.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas okupasi antar generasi.

Subyek Dan Metode

SUBYEK: Penelitian ini merupakan survey terhadap 711 penduduk Jakarta yang tinggal di 13 kelurahan: Krendang, Kalianyar, Penjaringan, Cipinang Muara, Pondok Kelapa, Srengseng, Meruya Utara, Penggilingan, Malaka Jaya, Jati, Bintaro, Kebayoran Lama Selatan, dan Pulo. Pada setiap kelurahan dipilih responden sebanyak 50 orang kecuali kelurahan Penjaringan (100), Pulo (100), Srengseng (11) dan

Malaka Jaya (49). Kelurahan dipilih secara purposif sedangkan pemilihan responden dilakukan secara random-sistematik.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai stratifikasi dilakukan rating terhadap 81 okupasi multi-dimensi yang mencakup dimensi politik (misalnya, gubernur, bupati); ekonomi (pengusaha, pengusaha) dan sosial budaya (kiyai, pastor). Dengan instrumen ini responden diminta memberi skor dan posisi setiap okupasi dalam salah satu lapisan [atas-atas dengan skor 6; atas-bawah (5); menengah-atas (4); menengah-bawah (3); bawah-atas (2) dan bawah-bawah (1)]. Dengan metode ini dapat diketahui skor prestis dan sekaligus lokasi okupasi tertentu dalam stratifikasi sosial.

Mobilitas diukur dengan menggunakan tabel bivariat yang membandingkan lapisan ayah dan anak. Para responden ditanya pekerjaan ayahnya (ketika responden berusia 16 tahun) sehingga dapat ditentukan lapisan sosialnya. Dengan tabel ini dapat diketahui pula proporsi yang mengalami kenaikan,

penurunan atau yang tetap. Selain itu dapat pula diketahui apakah terdapat mobilitas jarak panjang (lebih dari satu lapisan) atau jarak pendek (hanya naik atau turun satu lapisan).

Untuk mengetahui pengaruh faktor lain digunakan matriks interasosiasi dan korelasi yang terdiri dari variabel-variabel pendidikan anak, pendidikan ayah, status anak dan status ayah.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini hanya terdapat dua responden dari lapisan atas-bawah. Dengan demikian mobilisasi yang dianalisis hanya lapisan menengah dan bawah. Setiap lapisan tersebut dibagi dua sehingga terdapat empat lapisan yakni "menengah-atas," "menengah-bawah," "bawah-atas" dan "bawah-bawah."

Temuan Penelitian

Dengan menggunakan metode reputasional ini dapat diketahui bahwa pola stratifikasi yang dibayangkan oleh responden seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Stratifikasi dan Skor Prestis Okupasi di Jakarta

SKOR PRESTIS OKUPASI DI JAKARTA
ATAS-ATAS (5.5-6.0): 1. Menteri (5.53)
ATAS-BAWAH (5.0 < 5.5): 2. Gubernur (5.19); 3. Pati ABRI/Polri (5.16); 4. Professor (5.03); 5. Pengusaha Besar (5.02)
MENENGAH-ATAS (4.0 < 5.0): 6. Diplomat (4.83); 7. Walikota/Bupati (4.78); 8. Direktur Perusahaan (4.75); 9. Dokter (4.71); 10. Pegawai Negeri Eselon I (4.67); 11. Anggota DPR (4.66); 12. Manajer Perusahaan (4.63); 13. Hakim (4.53); 14. Pilot (4.51); 15. Arsitek (4.49); 16. Pegawai Negeri Eselon II (4.44); 17. Dosen (4.42); 18. Pengacara (4.37); 19. Anggota DPRD (4.36); 20. Jaksa (4.32); 21. Kiyai (4.28); 22. Pamen ABRI/Polri (4.22); 23. Camat (4.140); 24. Pengusaha Menengah (4.138)
MENENGAH-BAWAH (3.0 < 4.0): 25. Akuntan (3.98); 26. Asisten Manajer (3.95); 27. Pastor (3.91); 28. Guru Agama (3.87); 29. Guru SMA (3.830); 30. Apoteker (3.828); 31. Pegawai Eselon III (3.826); 32. Wartawan (3.81); 33. Lurah (3.79); 34. Penyiar TV (3.76); 35. Pama ABRI/Polri (3.74); 36. Juru Dakwah (3.67); 37. Pramugari (3.65); 38. Petani Besar (3.66); 39. Guru SMP (3.63); 40. Sekretaris (3.53); 41. Bidan (3.48); 42. Guru SD & TK (3.47); 43. Pengusaha Kecil (3.46); 44. Bintara ABRI/Polri (3.36); 45. Mantri Kesehatan (3.26); 46. Suster (3.24); 47. Petani Sedang (3.15); 48. Tamtama ABRI/Polri (3.101); 49. Pegawai Tata-usaha (3.096)
BAWAH-ATAS (2.0 < 3.0): 50. Masinis (2.96); 51. Nelayan (2.84); 52. Montir (2.79); 53. Tukang listrik/telpon (2.70); 54. Tenaga Penjualan (2.66); 55. Mandor Pabrik (2.64); 56. Mandor Bangunan (2.50); 57. Satpam (2.44); 58. Petani Kecil (2.39); 59. Sopir Taksi (2.368); 60. Sopir Pribadi (2.367); 61. Tukang Ketik (2.34); 62. Sopir Bis (2.32); 63. Pedagang Kaki Lima (2.14); 64. Pelayan Toko (2.13); 65. Sopir Bajay (2.11); 66. Pedagang Keliling (2.08); 67. Tukang Bangunan (2.034); 68. Buruh Pabrik (2.027)
BAWAH-BAWAH (1.0 < 2.0): 69. Kondaktur bis (1.98); 70. Pesuruh Kantor (1.962); 71. Buruh Tani (1.961); 72. Buruh Nelayan (1.95); 73. Pelayan Warung (1.93); 74. Tukang Kebun (1.90); 75. Pembantu Rumah Tangga (1.85); 76. Tukang Ojek (1.83); 77. Tukang Sapu Jalan (1.81); 78. Tukang Becak (1.77); 79. Pemulung (1.38); 80. Pengemis (1.11); 81. Gelandangan (1.10)

Persepsi stratifikasi responden menunjukkan bahwa lapisan elit atau atas terdiri dari multi-dimensi (politik, ekonomi dan sosial) yaitu Menteri, Gubernur, Pati ABRI/Polri, Profesor dan Pengusaha Besar. Demikian juga pada lapisan menengah-atas berlaku pola multi-dimensi yang terdiri dari kelompok profesional, manajer, administrator dan pengusaha. Secara umum pekerjaan yang dianggap lapisan menengah-bawah adalah pekerjaan setara tata-usaha. Lapisan bawah-atas diisi oleh tenaga kerja manual terampil atau semi terampil dan lapisan bawah-bawah tenaga kerja yang membutuhkan sedikit ketrampilan. Pengkategorian ini berkaitan erat dengan perspektif Okupasi (seperti yang digunakan BPS). Namun dengan memasukkan kategori pengusaha gambaran stratifikasi Jakarta akan lebih jelas.

Pendapat responden tentang stratifikasi menunjukkan bahwa mereka menganggap tinggi pekerjaan yang berkaitan dengan kekuasaan dimana menteri, gubernur dan pati ABRI/Polri mendapat ranking 3 besar pada lapisan atas. Demikian pula dalam lapisan menengah-atas, diplomat dan walikota/bupati mendapat prestis tinggi. Namun pekerjaan sebagai anggota DPR (ranking 11) dan anggota DPRD (ranking 19) dianggap tidak terlalu tinggi.

Metode reputasional seperti diatas secara jelas menunjukkan ranking status pekerjaan dan sekaligus posisinya dalam stratifikasi sosial. Keadaan ini lebih jelas dibandingkan jika digunakan metode

pengukuran prestis okupasi North dan Hatt. Pada metode reputasional North dan Hatt (Hodge, 1966), masyarakat diminta untuk memberi skor prestis terhadap okupasi-okupasi tertentu dengan kategori Excellent (100), *Good* (80), *Average* (60), *Somewhat below average* (40), dan *poor* (20). Dengan model ini dapat diketahui ranking dan skor prestis okupasi (dari 20 sampai 100) namun tidak jelas posisi okupasi dalam stratifikasi.

Hasil metode reputasional dapat dibandingkan dengan Metode obyektif yang digunakan oleh BPS dimana masyarakat dikelompokkan menurut Jenis Pekerjaan. Pengelompokkan ini dapat dibagi secara vertikal menjadi dua yakni pekerjaan kerah putih dan kerah biru. Jenis pekerjaan kerah putih terdiri dari jenis pekerjaan 0/1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan kerah biru terdiri dari jenis pekerjaan 6,7/8/9 (Ananta dan Fontana, 1995:43). Untuk data Indonesia dan DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan pada pembagian diatas maka masyarakat Indonesia jika dibagi menjadi white collar (non-manual) dan blue-collar (manual) akan menghasilkan proporsi sebagai berikut: 19.64% & 80.36% (1971); 24.43% & 75.57% (1980) dan 27.48% & 72.52% (1990). Untuk DKI Jakarta komposisi non-manual dan manual adalah 72.01% & 27.99% (1980) dan 66.94% & 33.06% (1993). Dari data DKI diketahui bahwa jumlah yang banyak tersebut merupakan penduduk pada kategori

Tabel 2. Struktur Okupasi Indonesia dan DKI

Jenis Pekerjaan DKI	1971	1980	1990	1980 DKI	1993 DKI
0/1 Profesional, Teknisi dan sejenisnya	2.14	3.01	3.62	4.58	4.80
2 Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0.46	0.15	0.15	0.9	1.08
3 Tenaga Tata Usaha dan yang sejenis	3.08	3.73	4.99	14.05	18.19
4 Tenaga Usaha Penjualan	10.15	12.90	14.62	29.17	26.01
5 Tenaga Usaha Jasa	3.81	4.64	4.10	23.31	16.86
6 Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	60.94	54.66	49.46	1.36	1.04
7/8/9 Tenaga Produksi, operator alat angkutan	11.26	18.77	22.19	27.49	30.33
Lainnya	8.16	0.71	0.03	1.2	1.69
Tidak terjawab	0.00	1.42	0.85		

pekerjaan 3,4 dan 5 atau klerikal, tata usaha. Sedangkan untuk pekerjaan non-manual seperti profesional, manager, jumlah penduduk DKI hanya sedikit lebih tinggi persentasenya. Namun tabel dengan metode obyektif dengan kriteria okupasi ini tidak sensitif mengukur sektor informal yang dikategorikan kedalam kategori 4 (Tenaga Usaha Penjualan) dan 5 (Tenaga Usaha Jasa) dan 7/8/9 (Tenaga Produksi dan Operator).

Jika dibandingkan antara metode rating dengan metode okupasi maka ditemukan bahwa lapisan atas dalam metode okupasi adalah kategori 0/1/2 yang senior. Sedangkan lapisan menengah-atas terdiri dari kelompok 0/1/2 dan lapisan menengah bawah adalah kategori 3/4/5. Sementara lapisan bawah (bawah-atas dan bawah-bawah) dalam metode rating mencakup kategori 6/7/8/9. Dengan studi ini diketahui pula bahwa sektor informal memang terletak pada lapisan bawah (bawah-atas dan bawah-bawah).

Mobilitas Okupasi Antar Generasi

Studi mobilitas sosial dalam sosiologi difokuskan pada mobilitas okupasi antar generasi dimana dibandingkan status anak dengan status ayahnya. Dengan cara ini dapat diketahui apakah terjadi perubahan status dan juga apakah masyarakat tersebut terbuka atau tidak. Berdasarkan hal ini maka dapat diketahui berapa persen mobilitas

vertikal (naik dan turun) dari setiap lapisan. Hal ini terlihat dalam tabel 3.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa korelasi (D Somers) antara status ayah dan status anak adalah 0.30 ($p < 0.000$). Hal ini menunjukkan asosiasi yang relatif lemah yang berarti bahwa status ayah hanya menyumbang sekitar 9%. Namun korelasi tersebut hanya mencakup responden dari lapisan bawah dan menengah saja karena tidak dimasukkannya responden dari lapisan atas. Sebagai perbandingan korelasi antara ayah-anak di pabrik pada studi Yasmin adalah 0.72 (anak laki) dan 0.84 (anak perempuan). Namun pada studi Bahari, korelasinya adalah 0.26. Lemahnya korelasi dalam studi Bahari, seperti juga penelitian penulis, disebabkan antara lain tiadanya responden dari lapisan atas.

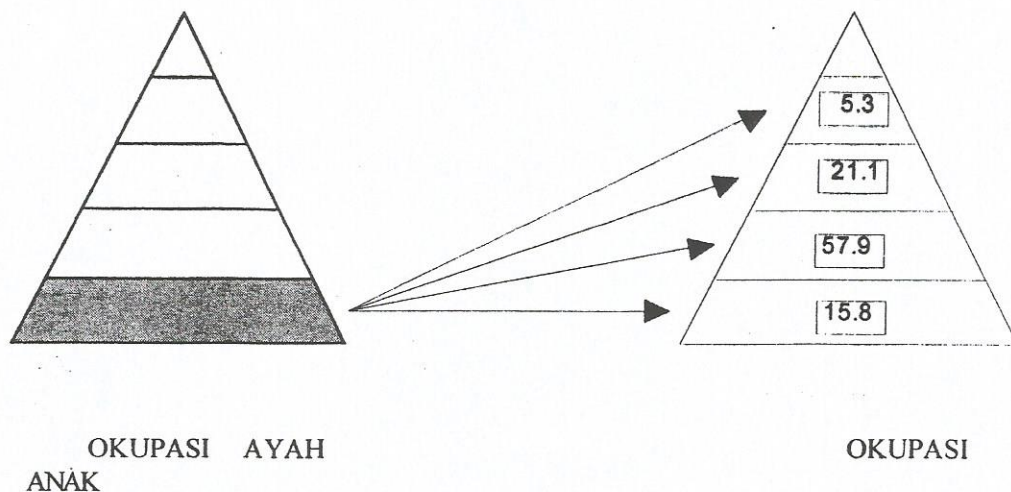
Selain itu diketahui bahwa responden yang tetap (stayers) adalah 44.2%, yang naik (climbers) sebanyak 39.2% dan yang turun 16.6% (sinkers). Data di tabel menunjukkan bahwa mobilitas cenderung meningkat pada jarak pendek atau di sekitar satu lapisan ke atas atau ke bawah. Sementara proporsi mobilitas jarak jauh (lebih dari satu lapisan) cenderung mengecil.

Pola mobilitas antar lapisan dapat dilihat juga bila disajikan dalam gambar-gambar berikut sehingga terlihat arah dan persentase mobilitas vertikal tersebut.

TABEL 3. Okupasi Anak dilihat dari Okupasi Ayah

OKUPASI RESPONDEN	OKUPASI AYAH				
	bawah bawah	bawah atas	menengah bawah	menengah atas	TOTAL
bawah bawah	6 15.8%	23 8.3%	9 3.1%	0 -	38 6.1%
bawah atas	22 57.9%	105 38.0%	62 21.4%	2 14.3%	191 30.9%
menengah bawah	8 21.1%	124 44.9%	157 54.1%	7 50.0%	296 47.9%
menengah atas	2 5.3%	24 8.7%	62 21.4%	5 35.7%	93 15.0%
	38 6.1%	276 44.7%	290 46.9%	14 2.3%	618* 100%

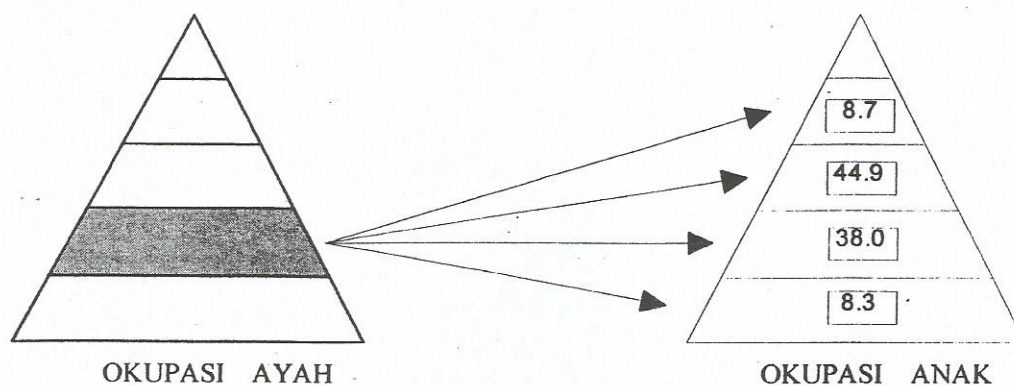
*Dari 711 responden hanya 618 yang mengetahui secara pasti pekerjaan ayah mereka.



GAMBAR 1. Mobilitas dari lapisan "Bawah-bawah"

Gambar 1 menunjukkan bahwa 15.8% responden yang berasal dari "bawah-bawah" (misalnya buruh tani) tetap mempunyai okupasi pada lapisan "bawah-bawah" dan sebanyak 57.9% naik ke "bawah-atas." Kenaikan yang lebih tinggi ke lapisan "menengah" dapat dirinci

sebagai berikut: 21.1% ke "menengah-bawah" dan 5.3% ke "menengah-atas." Data ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk naik keatas bagi lapisan "bawah-bawah" cukup besar walau pun mayoritas merupakan mobilitas yang jarak pendek atau ke "bawah-atas."

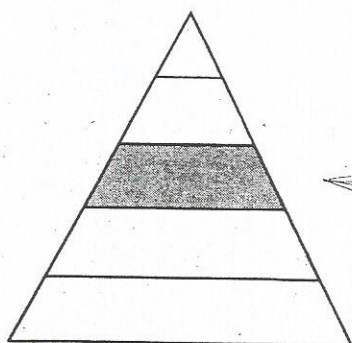


GAMBAR 2. Mobilitas dari lapisan "Bawah-atas"

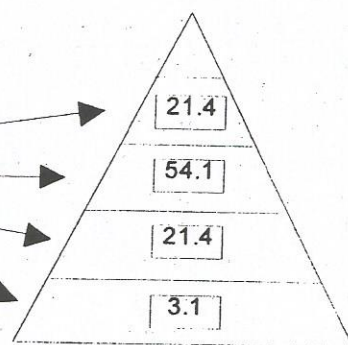
Mobilitas vertikal pada responden yang ayahnya berasal dari lapisan "bawah-atas" (petani kecil, mandor, supir) berarti mobilitas ke atas dan ke bawah. Dalam studi ini terdapat 8.3% responden yang mengalami penurunan ke "bawah-bawah." Sementara itu yang stabil (stayers) atau

berada pada lapisan yang sama seperti ayahnya ada 38.0%. Responden yang naik ke "menengah-bawah" ada 44.9% dan yang ke "menengah-atas" ada 8.7%.

Disinipun terlihat bahwa mobilitas terbesar adalah mobilitas vertikal jarak pendek dari "bawah-atas" ke "menengah-bawah."



OKUPASI AYAH

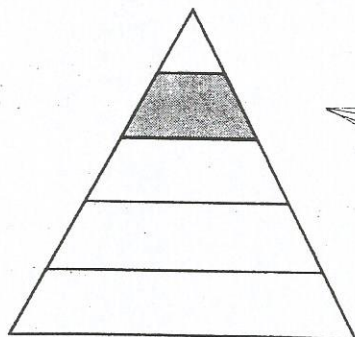


OKUPASI ANAK

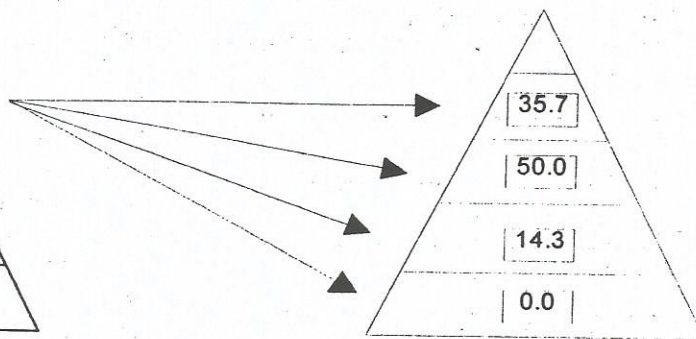
GAMBAR 3. Mobilitas dari lapisan "Menengah-bawah"

Para responden yang mempunyai ayah pada lapisan "menengah-bawah" sebagian besar (54.1%) tetap berada pada lapisan yang sama. Namun terdapat sebanyak 3.1%

yang turun ke "bawah-bawah" dan 21.4% yang ke "bawah-atas." Sementara itu yang meningkat ke "menengah-atas" cukup banyak yaitu 21.4%.



OKUPASI AYAH



OKUPASI ANAK

GAMBAR 4. Mobilitas dari lapisan "Menengah-Atas"

Responden yang mempunyai orang tua yang berasal dari lapisan "menengah-atas" hanya 14 orang. Dari jumlah ini hanya 5 orang (35.7%) yang tetap menduduki lapisan "menengah-atas" sementara 50.0 % turun ke "menengah-bawah" dan 14.3% ke "bawah-atas." Tidak terdapat seorang respondenpun yang turun ke "bawah-bawah." Disini terlihat bahwa penurunan lebih bersifat "jarak-pendek."

Jika dilihat dari segi penembusan ke lapisan "menengah-atas" maka terlihat bahwa hanya 5.3% berasal dari "bawah-bawah," 8.7% dari "bawah-atas," 21.4% dari

"menengah-bawah" dan 35.7% dari "menengah-atas." Data ini menunjukkan bahwa seorang anak dari keluarga "menengah-atas" atau kelompok profesional, manajer seperti dokter, arsitek mempunyai kesempatan sekitar 7 kali lebih besar dari anak yang ayahnya berada di lapisan "bawah-bawah" seperti buruh, pesuruh atau pelayan untuk mencapai okupasi kelompok profesional dan manajer Demikian pula anak dari kelompok "menengah-atas" ini mempunyai kesempatan 4 kali dibandingkan dengan anak dari "bawah-atas." Hanya saja dibandingkan dengan anak dari "menengah-

bawah” maka kesempatan anak “menengah-atas” hanya sekitar 1.5 kali (35.7% dibanding 21,4%).

Selain mobilitas okupasi antar generasi, kita dapat juga menganalisis keterkaitan beberapa variabel dalam proses tersebut. Tabel berikut menunjukkan bahwa hubungan antara status responden dengan pendidikannya relatif cukup kuat ($D \text{ Somers} = 0.47$). Hal ini berarti bahwa pendidikan cukup berperan dalam mobilitas okupasi antar generasi dan memberi kesempatan bagi mereka yang berada di lapisan bawah untuk mempunyai anak yang nantinya berada pada lapisan menengah. Pada tabel juga terlihat bahwa status ayah dipengaruhi oleh pendidikannya (0.36) dan pendidikan ayah berhubungan dengan pendidikan anak (0.49).

TABEL 4. Matriks Interasosiasi

	status responden	pendidikan responden	status ayah
pendidikan responden	0.47		
status ayah	0.30	0.37	
pendidikan ayah	0.36	0.49	0.36

P untuk keenam asosiasi : $< .00000$

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan sarana mobilitas yang penting. Namun terdapat pula sarana lain seperti kemajuan usaha. Misalnya seorang pedagang kaki lima (rangking 63/lapisan bawah atas) karena bantuan modal dan bimbingan usaha dapat saja mengalami peningkatan (mobilitas okupasi intra-generasi) sehingga ia meningkat menjadi pengusaha kecil (rangking 43/lapisan menengah-bawah) atau menjadi pengusaha menengah (rangking 24/lapisan menengah-atas). Dengan meningkatnya okupasi dan lapisan sosial seseorang (intra-generasi) berarti akan terjadi pula kemungkinan anak-anaknya mengalami peningkatan karena tersedianya biaya untuk pendidikan dan modal untuk pekerjaan/usaha anaknya. Disini terlihat kaitan antara

mobilitas intra-generasi dengan antar-generasi.

Selain peningkatan okupasi ayah (mobilitas intra-generasi) dan pendidikan yang berperan dalam mobilitas adalah perubahan sosial. Data menunjukkan bahwa stratifikasi masyarakat Jakarta pada lapisan bawah dan menengah relatif terbuka sehingga membantu mobilitas vertikal. Keterbukaan ini lebih disebabkan karena faktor teknologi dan urbanisasi. Dalam kepustakaan mengenai mobilitas sosial keadaan ini disebut *technological mobility* dan *Immigration (& migration) mobility* (Kahl 1975: 55-58). Dalam technological mobility struktur okupasi masyarakat pada tingkat bawah-atas (skilled labor) dan menengah bawah (klerikal) membesar. Data ketenagakerjaan DKI Jakarta menunjukkan keadaan ini (lihat tabel 2 makalah ini).

Sementara itu migration mobility berkaitan dengan perpindahan penduduk dari pedesaan ke Jakarta. Hal ini ditunjukkan oleh data migrasi Semasa hidup (*life-time migration*) ke Jakarta yang menunjukkan angka 40.07% (1971); 40.11% (1980) dan 38.53% (1990) sementara data nasional menunjukkan 4,94%; 6,97% dan 8,25%. Demikian juga migrasi keluar jauh lebih rendah yakni 2.91% (1971); 6.18% (1980) dan 12.79% (1990) (Alatas, 1995: 26).

Persamaan Kesempatan

Salah satu cara untuk melihat keterbukaan suatu masyarakat adalah dengan Indeks Persamaan Kesempatan (Inequality of opportunity) Miller dimana dihitung rasio penduduk yang berada pada okupasi non-manual yang ayahnya juga non-manual dengan penduduk yang berokupasi non-manual yang berayah manual. Semakin kecil nilai Indeks tersebut semakin terbuka suatu masyarakat. Indeks ini hanya mengukur keterbukaan antara lapisan “manual” dan “non-manual.”

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa dibandingkan dengan negara atau kota lain,

bidang jasa, penjualan dan tata usaha. Jika penelitian mobilitas tentang Indonesia telah dilakukan maka dapat diantisipasi bahwa angka Indeks tersebut akan lebih tinggi karena mencakup daerah/kota lain yang sangat berbeda dengan Jakarta.

Data studi ini menunjukkan bahwa terdapat 37.4% responden yang mempunyai okupasi "non-manual" dan berasal dari ayah yang okupasinya "non-manual." Sementara itu yang ayahnya berasal dari "manual" dan responden mencapai "non-manual" adalah sebesar 25.6%. Dengan demikian Indeks Persamaan Kesempatan Miller untuk Jakarta adalah 146. Angka ini termasuk baik jika kita bandingkan dengan beberapa keadaan di negara lain seperti yang terlihat dalam tabel berikut (Miller 1975: 91):

TABEL 5. Indeks Persamaan Kesempatan

NEGARA/KOTA	1 NON-MANUAL KE NON MANUAL %	2 MANUAL KE NON-MANUAL %	1/2 INDEX OF INEQUALITY %
Australia (Melbourne)	62.9	24.1	261
Japan	70.3	23.7	297
Netherlands	56.8	19.6	290
Great Britain	57.9	24.8	234
Sweden	72.3	25.5	284
Brazil (Sao Paulo)	81.5	29.4	277
India (Poona)	73.1	27.3	268
Indonesia (Jakarta)*	37.4	25.6	146

* : hasil penelitian penulis

Implikasi Teoretik

Beberapa kesimpulan dapat dike mukakan jika kita kaitkan temuan studi dengan kerangka teori yang ada.

Pertama, responden tidak mendapat kesulitan untuk menggolongkan okupasi ke dalam enam lapisan sosial (atas-atas, atas-bawah, menengah-atas, menengah-bawah, bawah-atas dan bawah, bawah). Hal ini me nunjukkan bahwa responden menganggap bahwa ke 81 okupasi tersebut memang dapat terbagi kedalam 6 lapisan. Keadaan ini mendukung teori yang melihat masyarakat

terdiri dari lapisan-lapisan (terutama model Goldthorpe yang Weberian). Dengan kata lain, model Status-attainment yang melihat masyarakat terdiri dari okupasi yang terurut secara hirarkis namun tanpa pemisahan (strata) kurang mempunyai kemampuan untuk membahas stratifikasi. Dengan model status attainment maka masyarakat Jakarta hanya terdiri dari 81 okupasi yang terurut tanpa kejelasan okupasi mana yang termasuk lapisan bawah, menengah dan atas.

Kedua, dikaitkan dengan model Marx-ist terlihat bahwa responden tidaklah menganggap pemilikan alat produksi atau sumber-sumber ekonomi sebagai yang pal- ing dominan. Pengusaha besar mendapat ranking nomor 5 pada strata atas dibawah Menteri, Gubernur, Pati ABRI/Polri dan

Profesor. Demikian juga pada lapisan menengah-atas, direktur mendapat urutan ke 8 dibawah diplomat dan walikota/bupati. Okupasi lain seperti manajer menduduki urutan ke 12, dan pengusaha menengah urutan ke 24 berada dibawah beberapa okupasi bidang politik dan profesi. Sementara itu pada lapisan menengah-bawah terdapat asisten manajer (urutan ke 26) dan pengusaha kecil (urutan ke 43). Pada lapisan bawah terdapat mandor pabrik (urutan 55) dan buruh pabrik (urutan 68). Secara umum hal ini menunjukkan bahwa okupasi

maka masyarakat Jakarta lebih terbuka. Namun angka ini akan membesar jika dalam sampel juga terwakili lapisan atas, karena politik dan profesi seringkali dianggap lebih tinggi prestisnya dibandingkan okupasi pemilikan alat produksi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pandangan responden mengenai stratifikasi masyarakat Jakarta bersifat multi-dimensi atau Weberian. Para responden mempunyai persepsi bahwa lapisan terdiri dari kelompok pekerjaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Ketiga, demikian juga para responden melihat stratifikasi Jakarta sebagai multi-strata dimana keberadaan lapisan menengah-atas dan menengah-bawah mencakup 43 dari 81 okupasi. Multi-strata dalam persepsi responden ini bertentangan dengan pendektan Marxist yang menekankan aspek dominannya dikotomi dalam stratifikasi: kelas yang memiliki dan kelas yang tidak memiliki alat produksi.

Keempat, dikaitkan dengan model okupasi yang sering digunakan oleh Biro Statistik (termasuk BPS Indonesia) maka pandangan responden tidak berbeda jauh. Hanya saja responden secara jelas menunjukkan siapa yang berada di setiap lapisan termasuk lapisan atas atau elit. Sementara ini kategori menurut BPS hanya membagi masyarakat menjadi tujuh golongan (Profesional & Teknisi, Kepemimpinan & Ketatalaksanaan, Tata usaha, Penjualan, Jasa, Tenaga pertanian dan Tenaga produksi). Pola stratifikasi yang ada seperti pembagian penduduk menurut "jenis pekerjaan" yang digunakan BPS hanya akan membagi masyarakat menjadi dua kelompok besar yaitu "non-manual/white collar" dengan "manual/blue collar." Dengan pola ini tidak terlihat jelas pola stratifikasi dan lapisan elit hanya diasumsikan sebagai bagian teratas dari kategori profesional, manajer, dan administrator. Demikian pula pembagian ini menyembunyikan kategori Pengusaha Besar yang dalam perpektif Weberian atau Marxist termasuk lapisan atas (elit). Dengan

melihat masyarakat melalui stratifikasi atas, menengah dan bawah maka analisis proses dan perubahan sosial akan lebih jelas terlihat.

Kelima, studi awal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai stratifikasi, terutama elit, sudah harus semakin banyak dibahas oleh sosiologi. Selama ini data umum yang ada sepertinya menyembunyikan elit sebagai suatu topik yang tabu, seperti juga "kemiskinan" yang baru benar-benar mendapat perhatian pada beberapa tahun terakhir.

Keenam, dilihat dari keterbukaannya, stratifikasi masyarakat Jakarta dapat dikatakan relatif terbuka, walaupun jarak pendek. Jika dilihat dari naik atau turunnya mobilitas sosial (okupasi antar-generasi), maka terlihat bahwa mobilitas keatas (social climbing) lebih banyak dari mobilitas kebawah (social sinking). Sementara itu yang posisinya tetap (social staying) relatif cukup banyak juga. Data menunjukkan bahwa stratifikasi masyarakat Jakarta pada lapisan bawah dan menengah relatif terbuka. Namun hal ini terutama bukan disebabkan karena kebijakan pemerintah yang memang sengaja dibuat untuk mobilitas vertikal.

Dengan kata lain, keterbukaan masyarakat Jakarta masih dapat diperbesar dengan kebijakan pemerintah seperti yang dikemukakan teori-teori kebijakan bagi mobilitas sosial (lihat Parkin 1971: 111).

Implikasi Kebijakan

Studi awal masyarakat Jakarta tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat keterbukaan dalam masyarakat Jakarta. Hanya saja pada "mobilitas jarak jauh" ketertutupan semakin nyata. Persentase lapisan bawah-bawah untuk mencapai lapisan menengah atas masih kecil (5.3%). Yang cukup baik adalah mobilitas jarak pendek (misalnya dari bawah-atas ke menengah-bawah) yaitu sebesar 45.3%.

Selain itu terlihat pula bahwa pendidikan (terutama pendidikan tinggi) dapat berfungsi sebagai eskalator sosial yang dapat

mengantarkan masyarakat lapisan bawah naik ke lapisan menengah.

Keadaan ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial dapat diperbaiki dengan menganalisis sarannya seperti pendidikan. Dalam hal ini perlu proteksi bagi "Masyarakat Jakarta (dan Indonesia) bagian "bawah" (terutama lapisan bawah-bawah) untuk dapat masuk ke "eskalator sosial" tersebut. Pola umum yang diperlukan adalah proteksi seperti yang terjadi pada bidang ekonomi dimana pengusaha kecil dilindungi dan sekaligus pengusaha besar diawasi. Dengan proteksi ini terjadi keadilan: kelompok yang lemah hanya bersaing melawan kelompok lemah lainnya.

Tanpa proteksi maka pendidikan hanya akan "mencerdaskan bangsa" tanpa "mengadilkan bangsa." Sebagai contoh, jika dulu seorang buruh tani tidak mempunyai pendidikan maka sekarang anaknya memperoleh pendidikan (misal SMP atau SMA) karena program SD Inpres atau Wajib Belajar. Namun tanpa bantuan proteksi maka pekerjaannya dapat saja tetap sebagai buruh tani. Secara ekonomi tidak akan terjadi perbaikan walaupun secara sosial (pendidikan) si anak akan merasa lebih bangga (atau frustrasi?). Dalam pembangunan terjadi "inflasi pendidikan."

Demikian pula usaha Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) yang hanya menyediakan biaya tanpa menyediakan tempat akan tetap mempertahankan kesenjangan antara anak-anak dari lapisan atas, menengah dan bawah. Pada jangka panjang kesenjangan antar anak ini akan menghasilkan kesenjangan antar lapisan sosial yang semakin membesar. Tanpa proteksi maka biaya sosial dan politik akan semakin mahal. Kasus pemberian kuota atau proteksi bagi 2000 warga Irian untuk menjadi pegawai negeri pada tahun 1996 menunjukkan bahwa kebijakan tanpa proteksi bagi kelompok lemah atau persaingan bebas tidak dapat dipertahankan lagi.

Proteksi ini akan menghasilkan pola

seperti sponsored mobility sebagai lawan dari contest mobility (Turner 1960). Sponsor disini merupakan upaya intervensi terutama oleh negara dengan peraturan pemberian kuota bagi lapisan bawah. Pola kuota dan proteksi ini telah diberlakukan di India bagi golongan the Scheduled Classes, the Scheduled Tribes dan the Backward Classes dimana mereka mendapat jatah 5-12.5 % (tergantung dengan proporsi mereka) di perguruan tinggi, tempat kerja dan parlemen (Kolenda 1985: 128). Hasil kebijakan kuota pekerjaan ini cukup cepat seperti yang terlihat dari hasil NEP (New Ekonomi Policy) Malaysia dimana kelompok profesional pribumi meningkat dari 5% pada 1970 menjadi 25% pada 1988 (Bortwick 1992:334).

Proses ini dengan melalui "Inkubator Sosial" membutuhkan kerjasama masyarakat, negara, pengusaha dan perguruan tinggi. Dengan dibukanya masyarakat maka terhindarlah pembentukan masyarakat yang bersifat "segmentasi" atau kasta seperti di India atau pra-kemerdekaan (Eropa, Timur Asing dan Pribumi).

Pemberian kuota pada lapisan bawah dapat dilakukan melalui program yang ada misalnya bagi anak-anak Pokmas Program IDT atau anak-anak dari keluarga Pra-Sejahtera. Program ini akan merupakan tahap baru aspek pemerataan dari Trilogi Pembangunan. Pada tahap pertama atau PJP I, pemerataan lebih bersifat fasilitas (SD Inpres, Puskesmas, Irigasi) dan keterkaitan antar kelompok ekonomi (PIR, TIR, Anak Angkat, Sub-Kontraktor, Pengalihan Saham). Tahap kedua dilakukan dengan lebih spesifik pada kelompok sasaran yaitu pemberian modal kerja, bantuan kelompok dan pendamping melalui Program IDT, Takesra, Kukesra dan Kartu Sehat.

Tahap proteksi dan kuota ini merupakan pemerataan status sosial. Dengan kebijakan reformasi struktur sosial ini diharapkan akan lebih banyak anak lapisan bawah seperti yang disebut dalam GBHN 1988

yaitu "buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani berlahan sempit, peternak kecil, nelayan, pengrajin, pengusaha kecil, informal dan tradisional maupun pekerja (GBHN 1988: 49; 78-79) yang memasuki berbagai pekerjaan pada lapisan menengah dan atas (Sujatmiko 1993).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tercantum bahwa "Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran" dan pada pasal 27 ayat 2 tercantum "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Temuan studi stratifikasi dan mobilitas sosial menunjukkan terdapat kesenjangan antara "hak' warga negara" dan "keadaan sebenarnya." Faktor stratifikasi sosial berkaitan erat dengan kesenjangan ini dan hal ini sebenarnya dapat dikurangi dengan memberi proteksi atau quota sehingga mobilitas sosial semakin besar.

Sudah saatnya bagi DPR dan Pemerintah untuk membuat Undang-Undang dan Peraturan yang melaksanakan proteksi sosial ini. Pemerataan kesempatan mencapai status yang lebih tinggi ini akan melengkapi kesempatan berusaha seperti pemberian kredit usaha.

Saran Untuk Studi-Studi Berikutnya

Studi mengenai mobilitas okupasi antar generasi (dan intra-generasi) yang bersifat kuantitatif perlu diperbanyak sehingga akan menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang anatomi masyarakat serta Keadilan Sosial di Indonesia. Studi ini perlu dilakukan secara nasional dengan menitipkan kuesioner pada Susenas dan Survey KB. Studi seperti ini perlu dilakukan diberbagai tempat seperti di kota sedang, kota kecil, desa pedalaman, desa pantai, maupun masyarakat terasing. Demikian pula studi stratifikasi dan mobilitas yang menganalisis peran jender merupakan bidang sosiologi yang masih perlu dilakukan. Diharapkan studi semacam ini akan lebih meningkatkan usaha-usaha mencapai masyarakat yang lebih adil.

Demikian pula survey ini perlu dibarengi dengan analisis isi tentang kebijakan yang ada, misalnya GBHN, REPELITA, UU, Peraturan-peraturan sehingga dapat diidentifikasi sejauh mana usaha perbaikan peningkatan mobilitas sosial telah dilakukan. Selain itu perlu pula studi kualitatif dimana dianalisis secara mendalam dampak para social climbers dan social sinkers pada status barunya. Adaptasi mereka pada Pemberian makna, sosialisasi, perilaku dan afiliasi politik merupakan bidang kajian yang penting baik secara teoretik maupun kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ALATAS SECHA (Editor). 1995. *Migrasi dan Distribusi Penduduk di Indonesia*. Jakarta: kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- ANANTA, ARIS dan AVANTI FONTANA. 1995. "Aspek Demografis Revolusi Pasar Kerja" dalam *Pasar Kerja dan Produktifitas di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Jakarta.
- BAHARI, JOHANES. 1994. *Mobilitas Okupasi Vertikal Intra dan Inter-generasional Pekerja Industri*. Tesis Magister Sosiologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- BLAU, PETER M. dan OTIS DUDLEY DUNCAN. 1967. *The American Occupational Structure*. New York: The Free Press.
- BORTHWICK, MARK. 1992. *Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia*. Boulder: Westview Press.
- DE GUSMAN, ELISIO A. 1983. "Social Mobility and Fertility in the Philippines"

- dalam Wilfredo F. Arce dan Gabriel C. Alvarez (ed.). *Population Change in Southeast Asia*. Singapore: SEAPRAP-ISEAS: 62-79.
- GILBERT, DENNIS dan JOSEPH A. KAHL. 1982. *The American Class Structure: A New Synthesis*. Homewood, Ill.: the Dorsey Press.
- GOLDTHORPE, J. 1980. *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*. Oxford: Clarendon.
- HODGE, ROBERT W. DONALD J. TREIMAN and PETER H. ROSSI. 1966. "A Comparative Study of Occupational Prestige." In *Class, Status and Power*, Reinhard Bendix and Seymour Martin Lipset. 2d.ed. New York: Free Press.
- JASPAN, M.A. 1961. *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia: A Trend Report and Annotated Bibliography*. Djakarta: Gunung Agung.
- KAHL, J.A. 1975. "Some Components of Occupational Mobility" dalam A.P.M. Coxon dan C.I. Jones (editor). *Social Mobility*: 43-60. Penguin Books, Harmondsworth, England.
- GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan Ketetapan MPR 1988. 1988. Padang: Angkasa Raya.
- KOLENDA, PAULINE. 1985. *Caste in Contemporary India: Beyond Organic Solidarity*. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press.
- LEVY, RENE dan DOMINIQUE JOYE. 1994. "What is Switzerland's Stratification Like: Classes, Prestige Gradation, Professional Categories? *International Sociology*. Volume 9 Number 3: 313-335.
- LIPSET, SEYMOUR MARTIN, dan REINHARD BENDIX. 1959. *Social Mobility in Industrial Society*. Berkeley: University of California Press.
- MILLER, S.M. 1975. "Comparative Social Mobility" dalam *Social Mobility*. Edited by A.P.M. Coxon dan C.L. Jones. Harmondsworth: England: 79-112.
- MONINGKA, NATALIE JASMIN. 1992. *Pencapaian Status Pekerjaan pada Pria dan Wanita Secara Inter-generasional*. Skripsi Sarjana Sosiologi FISIP-UI.
- MUBYARTO. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- PARKIN, FRANK. 1971. *Class, Inequality & Political Order: Social Stratification in Capitalist and Communist Societies*. New York: Praeger Publishers.
- POMER, MARSHALL I. 1981. *Intergenerational Occupational Mobility in the United States: A Segmentation Perspective*. Gainesville: University Press of Florida Book.
- SAUNDERS, PETER. 1990. *Social Class and Stratification*. Routledge: London & Newyork.
- SUJATMIKO, IWAN GARDONO. 1993. *Demokrasi Sosial dan Masyarakat Indonesia*. Makalah pada Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia sejak 1945." Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta, Mei.
- SUSANTI, HERA, MOH. IKHSAN.

- WIDYANTI. *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI dan LPEM-FEUI., tanpa tahun.
- SVALASTOGA, KAARE. *Diferensiasi Sosial*. Alimandan (Penterjemah). Jakarta: Bina Aksara, tanpa tahun.
- THOMAS, MURRAY. 1975. *Social Strata in Indonesia: A Study of West Java Villagers*. Antarkarya.
- TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. 1988. "Persepsi Mengenai Pelapisan Sosial dalam Perkembangan Sosiologi Indonesia" dalam *Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- TREIMAN, DONALD J. 1977. *Occupational Prestige in Comparative Perspective*. New York: Academic Press.
- TURNER, R. 1960. "Sponsored and Contest Mobility in the School System" dalam *American Sociological Review*, 25: 855-867.
- WEBER, MAX. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Edited and translated by Talcott Parsons. Glencoe, Illinois : Free Press.
- WRIGHT. ERIK OLIN. 1985. *Classes*. London: Verso.